

**Analisis Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mimika
Masa Pembangunan 2014 Sampai Dengan 2018**

¹Tharsisius Pabendon, ²Rahmat Arapi

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jambatan Bulan, Mimika, 99910, Indonesia

Histori Artikel

Pengajuan : 14 Februari 2021
Revisi : 09 Maret 2021
Diterima : 22 Maret 2021

Abstract

This study aims to determine the economic development of Mimika Regency during the 2014-2018 period and the implications of recommendations in the context of making strategic policies for its improvement. This study uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Mimika Regency, which is analyzed by criticizing the development of the RGDP structure along with the characteristics of the level and growth pattern of each component, and the HDI growth trend to evaluate the impact of economic development on people's welfare. The results of this study indicate that: 1) During the 2014-2018 period, there was no change in the economic structure was still dominated by the mining and quarrying sector; 2) The turmoil in Mimika Regency's RGDP is caused by the dominant mining and quarrying sector which is sensitive to macroeconomic and non-economic factors due to its unrenewable and rare nature; 3) The development strategy of each RGDP sector must pay attention to the characteristics of the level and pattern of growth so that the planning and development process can be carried out effectively and efficiently. 4) The HDI has grown very well, but is biased due to the large income gap between residents who work at PT Freeport Indonesia and its affiliated companies, and residents who work in other institutions, including civil servants. 5) The development of strategic centers for health and education services, as well as people's economic activities related to transportation facilities that have minimal barriers to become very strategic for indigenous people to access development outcomes that will increase their level of welfare.

Keywords:

Gross Regional Domestic
Income, Human
Development Index

Citation: Pabendon, T., & Arapi, R. (2021). *Analisis Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mimika Masa Pembangunan 2014 Sampai Dengan 2018. Journal of Economic and Regional Science, 1(2), 118-142.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pembangunan ekonomi Kabupaten Mimika selama periode 2014-2018 dan implikasi rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan strategis untuk peningkatannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, yang dianalisis dengan mengkritisi perkembangan struktur PDRB beserta karakteristik tingkat dan pola

pertumbuhan tiap komponennya, dan tren pertumbuhan IPM untuk mengevaluasi dampak pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Selama periode 2014-2018, tidak terjadi perubahan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertambangan dan penggalan; 2) Gejala PDRB Kabupaten Mimika disebabkan oleh dominannya sektor pertambangan dan penggalan yang sensitif terhadap faktor makroekonomi dan nonekonomi karena sifatnya yang *unrenewable* dan langka; 3) Strategi pembangunan setiap sektor PDRB harus memperhatikan karakteristik tingkat dan pola pertumbuhan agar proses perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 4) IPM tumbuh sangat baik, tetapi bias karena kesenjangan pendapatan yang besar antara penduduk yang bekerja di PT Freeport Indonesia dan perusahaan afiliasinya, dengan penduduk yang bekerja di lembaga lain, termasuk PNS. 5) Pengembangan pusat-pusat strategis pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan ekonomi rakyat yang terkait dengan sarana-prasarana transportasi yang minim hambatan menjadi sangat strategis bagi penduduk pribumi untuk mengakses hasil-hasil pembangunan yang akan meningkatkan tingkat kesejahtraannya.

JEL Classification: I1, I28, J2, J21, J24, O1

Penulis Korespondensi:

Tharsisius Pabendon

Phone: 081240579985

Email: tharsisiuspabendon2021@gmail.com

Kata Kunci:

Produk Domestik Regional

Bruto, Indeks Pembangunan

Manusia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan yang gencar ini oleh karena keyakinan pemerintah bahwa melalui proses pembangunan yang cepat upaya untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat akan lebih cepat pula didekati atau bahkan diwujudkan. Pewujudan pembangunan dimaksud dilakukan melalui program pembangunan yang merata ke setiap daerah hingga ke daerah-daerah terpencil dan dampaknya dinikmati pula secara merata oleh seluruh rakyatnya.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:11). Pembangunan ekonomi merupakan aktivitas yang terencana, terkoordinasi, terorganisasi, dan terkendali, yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya dari berbagai faktor pembangunan yang membentuk suatu pola yang saling berkaitan dan saling bersinergi serta dapat diamati dan dianalisis.

Arsyad (2010:374) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Kebijakan pembangunan daerah harus lebih ditekankan pada ciri khas daerah tersebut dengan memberdayakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik lokal yang mampu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat daerah.

Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi diperlukan indikator tertentu. Indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Selain itu, juga dapat membantu untuk mengetahui corak pembangunan suatu wilayah.

Todaro dan Smith (2009:52) mengemukakan bahwa ada tiga indikator dasar pembangunan yaitu pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana diukur dari tingkat harapan hidup, asupan nutrisi, dan tingkat mortalitas anak, serta pencapaian pendidikan sebagaimana diukur dengan tingkat melek aksara dan tingkat pendidikan.

Pendapatan per kapita merupakan indikator kinerja perekonomian yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk. Meskipun demikian, beberapa ekonom berpendapat bahwa pendapatan per kapita bukanlah indikator terbaik untuk menilai kinerja pembangunan suatu negara. Pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi juga harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan-kemajuan ekonomi (Arsyad, 2010:32).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indeks kinerja pembangunan yang dikembangkan oleh United Nations for Development Program (UNDP) sejak tahun 1990. Indikator utama sebagai acuan untuk mengukur IPM adalah tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil perkapita berdasarkan paritas daya beli.

Arsyad (2010:48) menyatakan bahwa nilai IPM suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah negara atau daerah tersebut terkait mengenai aspek pembangunan manusianya, bukan hanya pada tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Dukungan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia

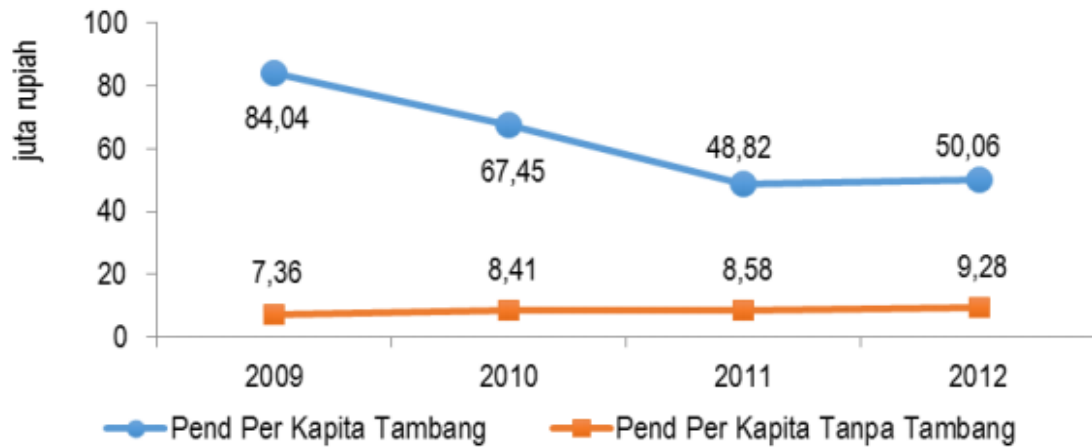
dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan proporsi anggaran untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.

Salah satu isu utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 yaitu kesenjangan pembangunan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh karena itu, fokus kebijakan pembangunan wilayah nasional dalam RPJM 2015-2019 adalah mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut. Dengan demikian, diperlukan kebijakan pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Strategi pengembangan wilayah dalam RPJM nasional 2015-2019 adalah pembangunan wilayah berdasarkan pada potensi dan keunggulan daerah serta lokasi geografis yang strategis. Dalam hal ini, Pulau Papua menjadi wilayah sendiri dengan berfokus pada pembangunan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi. Pembangunan lumbung pangan dilakukan melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit. Pembangunan sebagai lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga. Terdapat juga kebijakan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari.

Kabupaten Mimika, yang merupakan salah satu wilayah di Papua, melalui pemerintah daerah setempat, diharapkan mampu memahami dengan baik arah kebijakan RPJM Nasional 2015-2019 tersebut sehingga dapat melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah daerah serta melakukan sinergi dengan pemerintah pusat.

Pendapatan per kapita, sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi, dari Kabupaten Mimika tahun 2009 hingga tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Pendapatan per kapita Kabupaten Mimika

Sumber: RPJMD Kab. Mimika, 2014-2019

Dalam data tersebut di atas, terlihat bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Mimika selama 4 tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, di luar sektor tambang, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Di sisi lain, pada sektor pertambangan, pendapatan per kapita mengalami penurunan yang signifikan hingga 48,82 juta rupiah dan kembali naik pada tahun 2012 menjadi 50,06 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi pendapatan di sektor tambang lebih peka terhadap berbagai bentuk dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik ekonomi maupun non ekonomi seperti sosial dan politik, dibanding pendapatan di sektor non tambang.

Pada data tersebut di atas juga terlihat dengan jelas perbedaan mencolok antara pendapatan per kapita di luar sektor tambang dengan pendapatan per kapita pada sektor tambang. Hal ini tentunya mengakibatkan ketidakseimbangan daya beli yang sangat mempengaruhi harga pasar yang pada akhirnya lebih menekan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada kondisi ini, masyarakat di luar sektor tambang akan lebih mengalami kesulitan meningkatkan kesejahteraan karena penghasilan yang rendah akan menghambat mereka memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Dengan demikian, dalam proses pembangunan ekonomi Kabupaten Mimika selanjutnya, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang tidak hanya didominasi oleh sektor tambang tetapi terjadi sharing pada sektor-sektor yang lainnya, serta terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai pendapatan per kapita, akses kepada layanan kesehatan, serta akses kepada layanan pendidikan yang semakin meningkat. Perubahan struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dalam

perkembangan PDRB Kabupaten Mimika beserta komponen-komponennya pada periode selanjutnya, dan peningkatan kesejahteraan dapat diamati pada perubahan nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten Mimika.

Berdasarkan uraian penjelasan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Mimika dalam masa pembangunan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dilihat dari struktur ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya, dan untuk menarik nilai-nilai strategis dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat guna perubahan struktur ekonomi yang ke arah yang lebih seimbang serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan melakukan pengamatan kritis terhadap perilaku pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil pengamatan kritis tersebut, peneliti menilai kondisi kinerja pembangunan Kabupaten Mimika serta memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk penetapan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika. Instrumen analisis data yang digunakan adalah rumus laju pertumbuhan ekonomi, dimana nilai pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan membandingkan nilai tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Adapun rumus laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

$$R = \frac{PDB_x - PDB_{x-1}}{PDB_{x-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

R = Laju pertumbuhan

PDB_x = PDB tahun tertentu

PDB_{x-1} = PDB tahun sebelumnya

HASIL

PDRB Kabupaten Mimika

Pada dasarnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa hasil berbagai kegiatan ekonomi dalam wilayah tertentu. Adapun nilai PDRB terdiri atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Berikut data PDRB Kabupaten Mimika tahun 2014-2018, didasarkan pada data seri 2010, atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menurut lapangan usaha.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Mimika Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (Dalam Juta Rupiah)

No	Kategori	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,073,556	1,239,284	1,370,746	1,444,846	1,486,217
2	Pertambangan dan Penggalan	42,564,885	45,294,172	54,678,694	63,071,975	73,079,807
3	Industri Pengolahan	86,438	95,961	108,311	122,550	136,198
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,695	8,609	9,869	11,493	12,311
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,037	6,266	6,514	6,774	7,078
6	Konstruksi	1,332,788	1,602,857	1,938,750	2,172,159	2,391,005
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,299,987	1,499,863	1,735,881	1,963,340	2,116,575
8	Transportasi dan Pergudangan	715,219	838,662	966,367	1,081,195	1,169,554
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	162,021	182,904	205,430	231,412	249,689
10	Informasi dan Komunikasi	1,036,558	1,161,678	1,279,125	1,437,214	1,531,065
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	295,878	306,348	329,937	352,387	358,578
12	Real Estate	380,653	436,507	500,993	577,878	607,409
13	Jasa Perusahaan	268,171	283,674	305,349	330,743	380,317
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	756,717	908,868	1,095,845	1,162,901	1,305,308
15	Jasa Pendidikan	109,237	118,271	128,660	140,457	148,758
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91,958	106,449	125,531	138,779	150,127
17	Jasa lainnya	141,220	157,955	177,006	199,166	213,879
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		50,328,018	54,248,328	64,963,006	74,445,269	85,343,875

Sumber: BPS Mimika, data diolah 2019

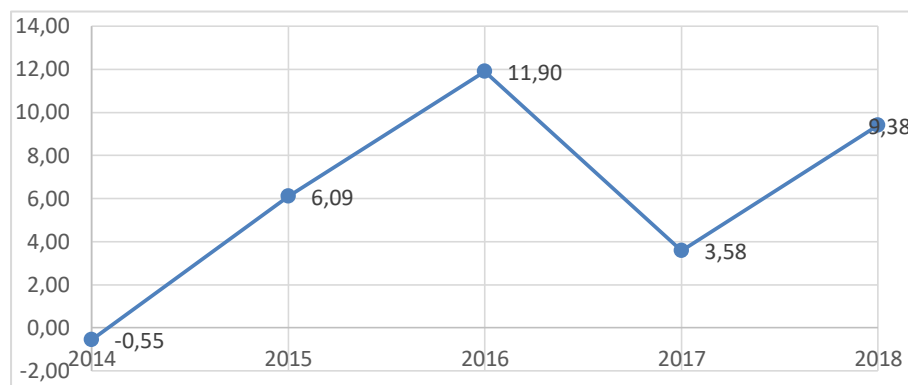
Pada gambar di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalan sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 namun setelah itu terus menerus mengalami penguatan.

Urutan perangkian berdasarkan data tahun 2018 di atas tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak terjadi perubahan struktur ekonomi yang signifikan dalam PDRB Kabupaten Mimika.

Adapun perubahan struktur yang terjadi pada tahun 2018 yaitu ketika sektor informasi dan komunikasi naik mengungguli sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan selisih Rp44.848.000.000; sektor jasa perusahaan atas sektor jasa asuransi dengan selisih Rp21.739.000.000; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial atas sektor jasa pendidikan dengan selisih Rp1.360.000.000. Namun demikian, nilai perubahan-perubahan tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun tersebut yaitu

sebesar Rp85.343.875.000.000. Kecilnya nilai perubahan-perubahan tersebut sehingga dapat dikatakan tidak terjadi perubahan struktur ekonomi yang signifikan.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika bergerak naik-turun secara ekstrim dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mimika sangat didominasi oleh sektor yang sensitif terhadap dinamika faktor-faktor lain seperti faktor sosial, politik, kondisi ekonomi global, kebijakan makro ekonomi nasional maupun global, dan sebagainya. Pola pergerakan pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika dapat kita lihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Pola pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika Tahun 2014-2018

Sumber: data sekunder, 2019

Pada tahun 2014, PDRB Kabupaten Mimika sempat mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -0,55%, lalu pada tahun berikutnya mengalami peningkatan secara mengesankan sebesar 6% yang memuncak pada tahun 2016 sebesar 11,90%. Namun pada tahun berikutnya, tahun 2017, mengalami penurunan pertumbuhan yang ekstrim menjadi 3,58%, dan setahun kemudian meningkat lagi secara drastis menjadi 9,38%. Pola pertumbuhan yang sangat fluktuatif ini menunjukkan pula bahwa PDRB Kabupaten Mimika membutuhkan sektor pendukung kuat lainnya yang dapat menjamin pola pergerakan pertumbuhan yang lebih stabil, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

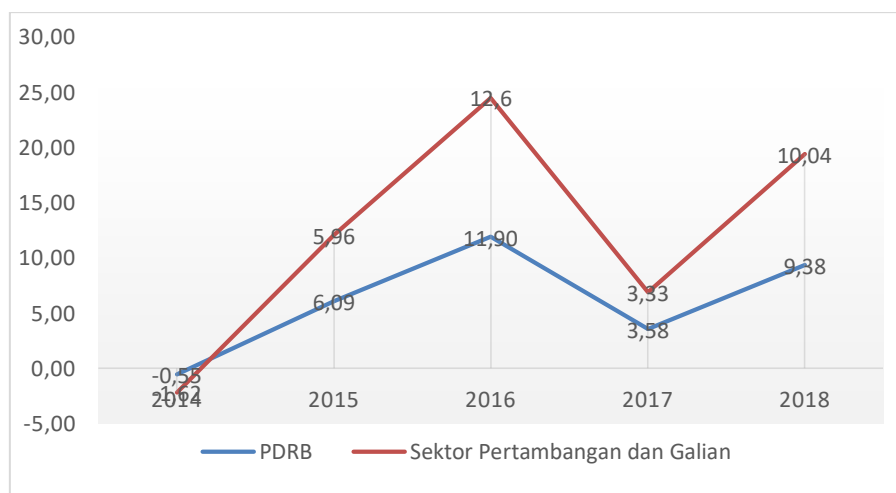
Untuk menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi, baik per sektor maupun secara keseluruhan, digunakan PDRB berdasarkan harga konstan (disebut juga PDRB riil) yang telah menghilangkan pengaruh nilai inflasi. Berikut adalah PDRB Kabupaten Mimika tahun 2014-2018 atas dasar harga konstan.

Tabel 2. PDRB Kabupaten Mimika Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018(Dalam Jutan Rupiah)

No	Kategori	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,023,445	1,092,924	1,161,649	1,213,675	1,232,077
2	Pertambangan dan Penggalian	46,557,521	49,510,078	56,648,912	58,598,049	65,136,628
3	Industri Pengolahan	81,600	86,823	93,499	100,987	107,530
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,596	7,596	7,835	8,178	8,523
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,013	6,151	6,300	6,458	6,595
6	Konstruksi	1,167,890	1,306,343	1,464,411	1,569,791	1,677,841
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,176,228	1,259,814	1,350,490	1,438,864	1,514,184
8	Transportasi dan Pergudangan	601,565	654,532	704,242	754,851	793,976
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149,033	158,233	168,033	179,028	189,292
10	Informasi dan Komunikasi	1,014,719	1,059,641	1,108,914	1,163,555	1,210,814
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270,282	273,345	288,718	296,372	289,093
12	Real Estate	358,902	377,408	397,033	418,313	430,529
13	Jasa Perusahaan	261,630	268,903	279,122	290,134	310,478
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	735,962	814,018	901,932	936,093	1,020,803
15	Jasa Pendidikan	104,889	109,242	113,939	119,088	124,008
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,406	94,075	103,294	109,738	116,012
17	Jasa lainnya	127,370	135,392	144,057	153,440	161,692
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		53,731,052	57,214,520	64,942,380	67,356,614	74,330,074

Sumber: BPS Mimika, data diolah 2019

Pada tabel 2. di atas, dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Mimika tahun 2014-2018 berdasarkan harga konstantetap konsisten mengalami kenaikan sesuai dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tabel 4.1 di atas. Telah terjadi peningkatan sebesar Rp20.599.022.000.000 (38,33%) dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan rata-rata kenaikan sebesar RP5.149.755.500.000 (9,58%) per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2015 ke 2016 yaitu sebesar Rp7.727.860.000.000 (13,50%) dan terendah dari tahun 2016 ke 2017 yaitu sebesar Rp2.454.232.000.000 (3,8%).



Gambar 3. Pola pertumbuhan produk Sektor Pertambangan dan Penggalian serta PDRB Kabupaten Mimika 2014-2018

Sumber: data sekunder, 2019

Dari gambar di atas, terlihat bahwa pergerakan pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika memiliki pola yang hampir sama dengan pergerakan pertumbuhan produk sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menunjukkan kekuatan pengaruh pergerakan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat kuat terhadap pergerakan pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika.

Sangat bergantungnya PDRB Kabupaten Mimika pada sektor pertambangan dan penggalian, yang tak lain adalah pertambangan tembaga dan emas yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia, mengakibatkan PDRB Kabupaten Mimika mengalami pasang surut pertumbuhan mengikuti pola pasang surut pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian.

Terkait kondisi-kondisi di atas, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sumberdaya ekonomi yang sifatnya tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*) yang memiliki jangka waktu pengelolaan yang terbatas. Sifat terbatas akan mengakibatkan masa pengelolaan sektor ini akan berakhir pada suatu waktu tertentu yang dapat diakibatkan oleh dua kemungkinan kondisi yaitu pertama, karena pasokan material tambang yang sudah tidak ekonomis, dan kedua, karena pertimbangan perlindungan lingkungan hidup. Itu berarti, sektor ini sudah pasti tidak dapat dijadikan jaminan sebagai sektor unggulan dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan keunggulan ekonomisnya akan semakin mengecil seiring dengan semakin menipisnya stok kandungan material tambang yang tersedia.

Dengan sifatnya yang *unrenewable* dan terbatas serta bernilai ekonomis tinggi karena tergolong material langka, sektor ini memiliki pula kerentanan instabilitas laju pertumbuhan yang tinggi. Sebagai isu faktor makro, baik secara nasional maupun internasional, baik ekonomi maupun non ekonomi, antara lain isu kebijakan upah buruh, isu kebijakan suku bunga perbankan, isu kebijakan investasi asing, isu politik dalam negeri dan luar negeri, isu pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, isu keamanan nasional, dan sebagainya dapat dengan cepat dapat mempengaruhi stabilitas pertumbuhannya.

Terdapat pula sektor-sektor lain yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi namun secara tren menunjukkan kedekatan korelasi, atau mengalami gejala multikorelasi yang kuat, dengan sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor inipun menunjukkan kerentanan instabilitas.

Pada sisi yang lain, terdapat sejumlah sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah, namun menunjukkan karakter pertumbuhan yang lebih stabil dan tidak memiliki ikatan korelasi yang kuat dengan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor ini, bila mendapat perhatian dengan baik, melalui penetapan strategi pengembangan yang tepat, akan dapat menjadi sektor unggulan di masa depan ketika sektor pertambangan dan penggalian sudah mulai mengalami masa penurunan tren produksi karena stok bahan galian yang makin menipis dan atau karena pertimbangan lain seperti kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan data hasil analisis dari berbagai karakter laju pertumbuhan dan pola tren dari setiap komponen PDRB di atas, kita dapat melakukan pemetaan komponen PDRB Kabupaten Mimika untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana merumuskan strategi dan tindakan pengembangan yang tepat pada masing-masing komponen PDRB tersebut sesuai dengan hasil pemetaannya masing-masing sehingga dapat diharapkan, secara bertahap, akan terjadi sharing kontribusi yang seimbang dalam struktur PDRB Kabupaten Mimika.

Dari hasil identifikasi, dijelaskan strategi pengembangan dari setiap komponen PDRB Kabupaten Mimika sebagai berikut:

1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan yang dapat penghambat penurunan pertumbuhan serta membuat program inovasi dalam jangka menengah (5 sampai dengan 10 tahun) untuk mengubah pola pertumbuhan menjadi meningkat.
2. Sektor pertambangan dan penggalian, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas pertumbuhan disertai dengan inovasi kebijakan pengembangan yang dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan menjadi sangat tinggi.
3. Sektor industri pengolahan, yaitu pemerintah mengintensifkan program pengembangan yang sudah berjalan serta melakukan inovasi kebijakan dan atau program pengembangan dalam waktu cepat untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan.
4. Sektor pengadaan listrik dan gas, yaitu pemerintah mengintensifkan program pengembangan yang sudah berjalan disertai program inovasi kebijakan dan atau

pengembangan dalam jangka panjang (10 sampai dengan 25 tahun) untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.

5. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, yaitu pemerintah melakukan intensifikasi pengembangan program yang sudah berjalan disertai inovasi kebijakan dan atau program pengembangan dalam jangka panjang (10 sampai dengan 25 tahun) untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.
6. Sektor konstruksi, yaitu pemerintah mengambil kebijakan yang menjamin stabilitas tren pertumbuhannya pada level sangat tinggi.
7. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menghambat tren penurunan pertumbuhannya disertai inovasi kebijakandan atau program pengembangan yang cepat untuk mengubah pola pertumbuhan serta meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.
8. Sektor transportasi dan pergudangan, yaitu pemerintah mengambil kebijakan untuk menghambat penurunan pertumbuhannya serta melakukan inovasi kebijakan dan atau pengembangan dengan cepat untuk mengubah pola pertumbuhan serta meningkatkan akselersi pertumbuhannya.
9. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu pemerintah melakukan inovasi kebijakan dan program pengembangan dengan cepat untuk mengubah pola pertumbuhan serta meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.
10. Sektor informasi dan komunikasi, yaitu pemerintah melakukan inovasi kebijakan dan atau program pengembangan jangka menengah (5 sampai dengan 10 tahun) untuk mengubah pola pertumbuhan serta meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.
11. Sektor jasa keuangan dan asuransi, yaitu pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menghambat penurunan pertumbuhan serta melakukan inovasi kebijakan dan atau program pengembangan jangka panjang untuk pola pertumbuhannya menjadi meningkat.
12. Sektor real estate, yaitu pemerintah melakukan inovasi kebijakan dan atau program pengembangan jangka panjang (10 sampai dengan 25 tahun) untuk mengubah pola pertumbuhan serta meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.

13. Sektor jasa perusahaan, yaitu pemerintah melakukan intensifikasi program pengembangan yang sedang berlangsung serta melakukan inovasi kebijakan dan atau program pengembangan jangka menengah untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.
14. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yaitu pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menjamin stabilitas pertumbuhan yang tinggi.
15. Sektor jasa pendidikan, yaitu pemerintah melakukan inovasi kebijakan dan atau program pengembangan jangka menengah (5 sampai dengan 10 tahun) untuk mengubah pola pertumbuhan serta meningkatkan akselerasi pertumbuhannya.
16. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu pemerintah mengambil kebijakan pengembangan yang dapat menjamin stabilitas pertumbuhannya pada level sangat tinggi.
17. Sektor jasa lainnya, yaitu pemerintah melakukan inovasi kebijakan dan atau program pengembangan dengan cepat untuk mengubah pola pertumbuhan serta meningkatkan laju pertumbuhannya.

Dari hasil penetapan strategi pengembangan pada masing-masing sektor di atas, terdapat kejelasan arah dan tindakan pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat dipastikan bahwa sektor-sektor tersebut secara keseluruhan diarahkan pada upaya optimalisasi sumber daya sesuai dengan kondisi nyata kekuatan akselerasi dan pola pertumbuhannya masing-masing.

Hasil-hasil pengembangan berdasarkan pemahaman yang baik pada kekuatan akselerasi dan pola pertumbuhan ini diharapkan dapat melahirkan kekuatan-kekuatan sektor baru dalam struktur PDRB Kabupaten Mimika sehingga tidak tergantung pada satu sektor saja melainkan terjadi pembagian kekuatan yang relatif seimbang pada sektor-sektor yang lain. Selanjutnya, melalui sharing kekuatan itu, PDRB Kabupaten Mimika akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai gonjangan faktor-faktor makro ekonomi maupun non ekonomi sehingga stabilitasnya dapat terjaga dengan baik.

Melalui proses pembangunan yang terarah melalui penetapan strategi pengembangan yang tepat pada setiap sektor tersebut, dapat pula diharapkan dampak yang lebih kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika

karena akan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata di segala bidang.

IPM Kabupaten Mimika

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) adalah angka yang menunjukkan prestasi peningkatan kesejahteraan manusia dari hasil-hasil pembangunan. IPM diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu kualitas umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Kualitas umur ditunjukkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH), kualitas pendidikan ditunjukkan oleh angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan kualitas pendapatan ditunjukkan oleh tingkat Pendapatan Per Kapita.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Tahun 2014-2018

TAHUN	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	PENGELUARAN (Rp000)	IPM
2014	71.87	10.49	9.30	10,872.90	70.40
2015	71.89	10.78	9.38	10,952.21	70.89
2016	71.90	11.11	9.53	11,169.00	71.64
2017	71.93	11.48	9.54	11,591.00	72.42
2018	72.06	11.77	9.76	11,700.00	73.15
RATA-RATA	71.93	11.13	9.50	11,257.02	71.70

Keterangan:

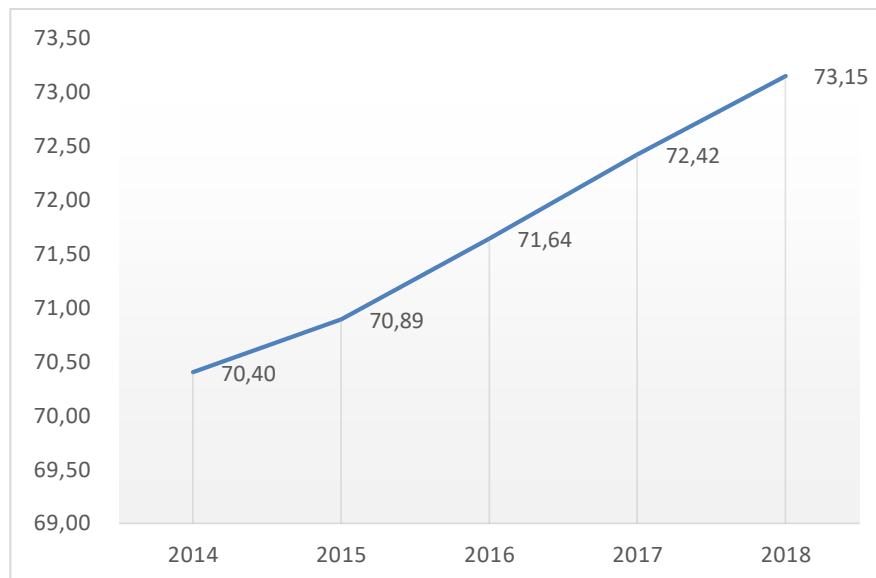
AHH : Angka Harapan Hidup

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Sumber: BPS Mimika, data diolah 2019

Pada tabel di atas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Mimika pada tahun 2014 sebesar 70,40 poin dan cenderung mengalami peningkatan secara signifikan hingga mencapai 73,15 poin pada tahun 2018. Dengan demikian, selama periode 2014-2018, IPM Kabupaten Mimika telah mengalami peningkatan sebesar 2,75 poin dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,69 poin. Peningkatan yang signifikan ini terjadi karena adanya peningkatan indeks pencapaian dari keempat komponen IPM yaitu AHH (meningkat 0,26 tahun), HLS (meningkat 1,28 tahun), RLS (meningkat 0,46 tahun) dan pengeluaran perkapita masyarakat (meningkat Rp 827.100). Adapun pergerakan peningkatan IPM Kabupaten Mimika yang signifikan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Pergerakan IPM Kabupaten Mimika 2004-2018

Sumber: data sekunder, 2019

Nilai IPM Kabupaten Mimika mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,69 poin. Peningkatan per tahun yang signifikan ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Kabupaten Mimika, secara umum, telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada komponen Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin baik. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini dapat didukung oleh 3 hal, pertama, sistem pelayanan kesehatan (termasuk di dalamnya ketersediaan saran-prasarana) yang semakin baik; ke dua, peningkatan pemahaman pola hidup sehat masyarakat; dan ke tiga, kemampuan ekonomi masyarakat untuk mengakses jasa pelayanan kesehatan semakin tinggi, termasuk untuk mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Ketiga hal ini telah berkontribusi terhadap peningkatan jaminan kehidupan dan perkembangan jasmani yang baik pada setiap kelahiran bayi di Kabupaten Mimika sehingga hasilnya dapat dilihat pada peningkatan Angka Harapan Hidup yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Terkait sistem pelayanan kesehatan, semakin membaiknya aspek ini ditandai oleh semakin menjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan di hampir seluruh wilayah

kecamatan Kabupaten Mimika yaitu pada tahun 2018 sudah terdapat 99 pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 6 rumah sakit, 22 puskesmas, 45 puskesmas pembantu, dan 26 klinik/balai kesehatan/posyandu. Di setiap kecamatan, terdapat minimal 1 puskesmas dan satu puskesmas pembantu, kecuali untuk Distrik Jila yang belum ada puskesmas pembantu (sumber: BPS Kabupaten Mimika 2019).

Namun demikian, dari data di atas, keseluruhan rumah sakit, yaitu sebanyak 6 buah, masih terkonsentrasi di wilayah kota Timika dan sekitarnya sehingga masyarakat di daerah-daerah terpencil yang mengalami penyakit berat dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif masih harus melalui jalur dengan medan yang berat dan lama untuk sampai ke rumah sakit. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu melakukan klusterisasi wilayah berdasarkan keadaan topografinya kemudian menempatkan rumah sakit-rumah sakit dengan sistem, perangkat, dan tenaga medis yang memadai di setiap wilayah strategis untuk melayani kelompok klusterisasi wilayah tersebut.

Khusus untuk tenaga medis, masih seringnya terjadi keluhan kekurangan tenaga medis di sejumlah puskesmas di wilayah pelosok harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Guna mengatasi hal ini, pemerintah perlu membangun sistem rekrutmen tenaga medis beserta sistem penjaminan hidupnya untuk ditempatkan di wilayah-wilayah pelosok.

Perlu juga diperhatikan bahwa, dengan kondisi wilayah yang luas yaitu 21.695 Km² disertai topografi yang berat dengan wilayah pegunungan yang curam serta lembah yang dilewati banyak aliran sungai yang dalam dan luas, tidak memungkinkan bagi alat transportasi darat untuk menghubungkan daerah yang satu terhadap yang lain. Untuk itu, Kabupaten Mimika sangat membutuhkan dukungan alat transportasi udara dan air khusus pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien.

Pada aspek pendidikan, Kabupaten Mimika juga mengalami peningkatan nilai indeks yang konsisten. Nilai HLS pada tahun 2014 sebesar 10,49 terus menerus mengalami peningkatan menjadi 11,13 pada tahun 2018. Begitupun dengan nilai RLS sebesar 9,30 pada tahun 2014 menjadi sebesar 9,50 pada tahun 2018.

Namun demikian, dibandingkan dengan nilai HLS nasional, nilai HLS Kabupaten Mimika masih lebih rendah, artinya, secara umum di Indonesia, dibandingkan dengan

daerah-daerah lain, harapan lama sekolah bagi anak-anak usia sekolah yang lahir di Kabupaten Mimika lebih rendah dari anak-anak usia sekolah di daerah lain di Indonesia.

Hambatan yang dialami putra-putri Kabupaten Mimika dalam mengakses sekolah adalah sebaran sekolah menengah yang belum sampai ke pelosok-pelosok. Bagi masyarakat, terutama masyarakat pendatang yang tinggal di wilayah-wilayah perkotaan dan wilayah seputar perkotaan, dapat dengan mudah mengakses fasilitas pendidikan yang menengah dan tinggi yang berada di wilayah perkotaan. Namun demikian, bagi masyarakat-masyarakat putra daerah, yang tinggal di wilayah-wilayah pelosok, mengalami hambatan yang sangat berarti.

Tabel 4. Sebaran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Kabupaten Mimika

KECAMATAN		SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TTL
		N	S	JM	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
TOTAL		61	80	141	29	34	63	6	12	18	5	19	24	246
1	Kec. Mimika Barat	2	2	4	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6
2	Kec. Mimika Timur	4	5	9	2	2	4	0	3	3	2	2	4	20
3	Kec. Mimika Baru	14	32	46	6	19	25	4	8	12	2	17	19	102
4	Kec. Agimuga	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
5	Kec. Mimika Barat Jauh	1	5	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	8
6	Kec. Mimika Barat Tengah	3	5	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10
7	Kec. Tembagapura	5	2	7	2	2	4	0	0	0	0	0	0	11
8	Kec. Jila	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
9	Kec. Jita	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
10	Kec. Kuala Kencana	6	6	12	2	4	6	0	0	0	1	0	1	19
11	Kec. Mimika Timur Jauh	3	2	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	7
12	Kec. Mimika Tengah	2	4	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
13	Kec. Kwamki Narama	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
14	Kec. Hoya	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Kec. Iwaka	4	1	5	3	0	3	1	0	1	0	0	0	9
16	Kec. Wania	7	10	17	2	6	8	0	1	1	0	0	0	26
17	Kec. Amar	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
18	Kec. Alama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Sumber: data sekunder, 2019

Dari tabel di atas, sangat jelas terlihat sebaran fasilitas sekolah yang tidak merata di Kabupaten Mimika. Sebagian besar sekolah, terutama sekolah menengah, terkonsentrasi di wilayah yang merupakan pusat perkotaan dan keramaian yaitu Kecamatan Mimika Baru, Kecamatan Wania, Kecamatan Mimika Timur, dan Kecamatan Kuala Kencana. Dengan kondisi ini, anak-anak usia sekolah di wilayah-wilayah pelosok yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi mengalami hambatan yang sangat besar.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan perencanaan pembangunan fasilitas persekolahan yang didahului oleh pemetaan kepadatan penduduk serta pemetaan lokasi persekolahan strategis berdasarkan keterjangkauan dan kemudahan sarana transportasi bagi anak-anak sekolah. Berdasarkan hasil-hasil pemetaan tersebut, pemerintah membangun sekolah-sekolah di tempat-tempat strategis yang dipilih yang didasarkan pada perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada berbagai jenjang dan serta berkelanjutan.

Hal lain yang dapat menghambat mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Mimika adalah kurangnya fasilitas untuk mendukung kehidupan para guru di daerah-daerah pelosok, seperti fasilitas perumahan, alat transportasi, serta pasokan bahan makanan yang memadai. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa jaminan keamanan masih menjadi salah satu faktor penghambat utama yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi-kondisi ini telah mengakibatkan banyak tenaga pengajar yang menarik diri dari daerah penugasan sehingga anak-anak usia sekolah pada wilayah-wilayah tersebut menjadi telantar.

Menghadapai kenyataan ini, jaminan khusus bagi para tenaga pengajar di wilayah-wilayah berkategori terpencil dan rawan keamanan adalah mutlak. Penempatan para tenaga guru di tempat-tempat tersebut harus didahului oleh kepastian tempat tinggal yang layak dan aman serta pasokan bahan baku makanan serta peralatan dan perlengkapan mengajar yang memadai dan berkelanjutan. Pemerintah harus membangun sistem yang memberikan jaminan ini secara berkelanjutan dengan standar mutu yang konsisten sehingga proses pendampingan terhadap anak-anak usia sekolah di wilayah terpencil tidak mengalami gap ketertinggalan yang terlalu melebar dengan anak-anak usia sekolah di wilayah-wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah padat fasilitas.

Pada jenjang pendidikan tinggi, masih terbatasnya lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Mimika mengakibatkan masyarakat usia pendidikan tinggi belum memiliki

pilihan yang banyak dalam menempuh pendidikan tinggi sehingga harus berhenti sekolah pada tingkat sekolah menengah atas. Pilihan menempuh pendidikan tinggi di luar daerah dapat dilakukan namun harus menanggung biaya kuliah yang lebih besar. Dengan kondisi ini, pemerintah perlu memberikan perhatian, antara lain melalui kebijakan pendanaan pengembangan institusi dan pendanaan pengembangan tenaga sumber daya manusia, sehingga institusi-institusi ini dapat mengembangkan kapasitas pengelolaannya yang diikuti oleh perbaikan mutu pelayanan pendidikan yang lebih profesional.

Pada nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Kabupaten Mimika memiliki nilai sebesar 9,76 pada tahun 2018 lebih tinggi dari nilai RLS nasional sebesar 8,17. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Mimika yang berusia 25 ke atas memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari rata-rata penduduk pada usia yang sama di daerah lain di Indonesia. Namun demikian, hal ini perlu dicermati lebih lanjut apakah hal ini karena prestasi peningkatan sistem pendidikan di Kabupaten Mimika atau karena faktor migrasi penduduk pendatang usia pencari kerja ke Kabupaten Mimika yang rata-rata telah memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Mengenai hal ini, untuk mendapatkan nilai yang akurat, perlu dilakukan pendataan secara teliti dan spesifik yang memisahkan antara penduduk usia 25 tahun ke atas yang menempuh pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas di Kabupaten Mimika dengan penduduk pendatang usia 25 tahun ke atas yang tidak menempuh pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas di Kabupaten Mimika. Ini menjadi penting mengingat tingginya jumlah penduduk pendatang di Kabupaten Mimika yang bermigrasi dari berbagai wilayah lain di Indonesia sebagai akibat dari beroperasinya berbagai perusahaan skala internasional dan nasional di Kabupaten Mimika. Dengan demikian, sebaiknya ukuran prestasi pengembangan sistem pendidikan di Kabupaten Mimika menggunakan parameter HLS saja karena pengamatannya tidak terpengaruh oleh penduduk migrasi masuk.

Pada aspek pendidikan ini, sangat penting untuk mengamati dengan seksama seberapa besar masyarakat asli daerah yang terakomodir oleh pembangunan di bidang pendidikan mengingat jumlah penduduk miskin Kabupaten Mimika tahun 2018 yaitu sebesar 14,89% adalah sebagian besar merupakan masyarakat asli daerah.

Pada kasus PT Freeport Indonesia, pada tahun 2017, 45 tahun sejak mulainya operasi penambangan biji emas dan tembaga di Tembagapura pada tahun 1972, dengan total

pekerja sebanyak 33.452 orang, baru terdapat 8.413 orang (25,15%) orang Indonesia asli Papua, dan sisanya yaitu sebesar 24.195 orang (72,33%) adalah orang Indonesia non Papua serta 844 orang (2,5%) adalah orang asing. Masih kecilnya prosentase masyarakat asli Papua yang terserap pada perusahaan ini menunjukkan lambatnya daya serap PT Freeport terhadap tenaga-tenaga sumberdaya manusia asli daerah.

Bila dilihat lebih jauh, para tenaga kerja putra-putri asli daerah masih sangat langka yang bekerja pada bidang-bidang kerja yang membutuhkan daya pengetahuan serta tingkat ketelitian dan keterampilan yang tinggi. Sebagian besar masih terserap pada bidang-bidang kerja yang membutuhkan daya pengetahuan serta tingkat ketelitian dan keterampilan level rendah.

Kenyataan pada kasus PT Freeport di atas menunjukkan bahwa pendekatan program pengembangan pendidikan yang selama ini diterapkan belum mampu mengakselerasi mutu sumber daya manusia putra-putri asli daerah untuk setara dengan sumberdaya manusia dari daerah lain di Indonesia. Itu berarti, dibutuhkan upaya yang berbeda yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam satu sistem pendidikan yang lebih merangsang minat, daya juang, serta daya kritis yang tinggi dari putra-putri asli daerah dalam menuntut ilmu pada berbagai jenjang pendidikan. Sistem yang komprehensif dan terintegrasi tersebut bisa saja memasukkan pendekatan sosio kultural, selain pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta perangkat sarana prasarana pembelajaran dalam satu kesatuan sistem program pendidikan. Pelibatan psikolog pendidikan secara konsisten dan berjenjang pada setiap level pendidikan dalam proses pembentukan karakter juga sebaiknya menjadi salah satu spek yang dipertimbangkan dengan serius.

Selain upaya pendekatan pemecahan masalah pada sisi faktor input (anak didik) dan sistem pendidikan yang diterapkan, pendekatan pemecahan masalah harus pula memperhatikan faktor kualitas tenaga pendidik. Hanya berbekal penguasaan ilmu yang baik tidak cukup menjadi sosok seorang tenaga pendidikan yang berkualitas. Tenaga pendidik yang berkualitas harus pula mampu menghadirkan rasa cinta yang nyata kepada setiap insan peserta didiknya dan terhadap pendidikan itu sendiri melalui berbagai pola bahasa vokal, pola bahasa tubuh, dan pola tindakan dalam seluruh rangkaian proses mendidik dan mengajar yang dilakukannya.

Sehubungan dengan itu, sistem dan proses rekrutmen dan pelatihan bagi para tenaga guru harus diatur sedemikian rupa dalam rangka menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang tidak hanya memiliki jaminan pengetahuan yang mencukupi tetapi juga kuat dalam membangun karakter setiap sosok peserta didik. Dengan kualitas seperti itu maka faktor kompensasi yang layak sebagai penghargaan atas kapasitas dan profesionalisme para pendidik harus pula sangat diperhatikan.

Pada aspek pengeluaran, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengeluaran penduduk Kabupaten Mimika lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengeluaran penduduk nasional yang artinya kemampuan penduduk Kabupaten Mimika untuk memenuhi kebutuhannya lebih tinggi dari penduduk dari daerah lainnya secara nasional. Dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi tersebut, dapat pula disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Mimika lebih tinggi dari rata-rata pendapatan per kapita penduduk daerah lain di Indonesia.

Namun demikian, terkait pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Mimika, terdapat resiko bias yang tinggi mengingat adanya kesenjangan yang sangat besar antara standar besaran gaji bagi para pekerja di lingkungan PT Freeport dan perusahaan afiliasinya dengan besaran gaji pekerja pada perusahaan lainnya, baik yang dikelola oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah daerah, termasuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hasil penelusuran (<https://bali.tribunnews.com/2017>) menunjukkan bahwa gaji pokok untuk jabatan paling bawah pada PT Freeport Indonesia atau disebut karyawan pratama mencapai Rp8 juta. Dibandingkan dengan UMK Kabupaten Mimika sebesar Rp3,368 juta pada tahun 2018, terdapat kesenjangan yang sangat besar. Perbedaan yang sangat besar ini, secara statistik, tentunya akan mengoreksi pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Mimika menjadi jauh lebih besar sehingga terjadi bias yang signifikan. Hal ini juga akan berlaku pada nilai rata-rata pengeluaran per kapita karena para pekerja di lingkungan PT Freeport dan perusahaan afiliasinya, dengan pendapatan yang jauh lebih besar, akan membentuk pola konsumsi yang juga jauh lebih besar dibanding para pekerja di perusahaan lainnya dan PNS.

Sehubungan dengan gejala ini dan melihat hasil analisis dan pembahasan sebelumnya di atas, untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita penduduknya yang berada di luar sektor tambang, pemerintah Kabupaten Mimika dapat

memaksimalkan sektor-sektor lainnya melalui strategi pengembangan berdasarkan karakteristik tingkat pertumbuhan dan pola pertumbuhannya sebagaimana pada hasil pemetaan dalam tabel 4.7 di atas. Pengembangan sektor-sektor melalui pengenalan yang baik pada karakteristik sektor-sektor tersebut akan dapat mengefisienkan penggunaan anggaran dan mengaktifkan proses pembangunan.

Perlu pula diingat bahwa salah satu kunci utama yang akan memberikan dukungan kemudahan dalam usaha meningkatkan akselerasi pengembangan pada berbagai sektor tersebut yaitu keberadaan infrastruktur dasar yang memadai terutama jalan, bandar udara, dan pelabuhan untuk menghubungkan simpul-simpul ekonomi serta untuk membangun simpul-simpul ekonomi baru. Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai ini akan berdampak signifikan pula terhadap kemandirian akses masyarakat pada berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan produktivitasnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa akses antar wilayah masih merupakan salah satu hambatan utama bagi masyarakat Kabupaten Mimika dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya. Program pembangunan untuk membuka akses ini hendaknya menjadi perhatian pertama dan utama pemerintah Kabupaten Mimika bila hendak menciptakan sektor-sektor ekonomi kuat baru sehingga terjadi penguatan struktur ekonomi dalam PDRB yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Belum terjadi perubahan struktur ekonomi Kabupaten Mimika selama masa pembangunan 2014 sampai dengan 2018 dimana nilai sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi nilai PDRB dengan sangat kuat sebesar rata-rata 84,52%. Struktur PDRB yang sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian ini mengakibatkan pola pertumbuhan PDRB sangat rentan terhadap gejolak faktor-faktro makro, baik yang ekonomi maupun non ekonomi.

Terdapat karakter tingkat dan pola pertumbuhan dari masing-masing sektor dalam struktur PDRB Kabupaten Mimika yang hendaknya dikenali dengan baik dan dapat

dijadikan dasar untuk menyusun strategi pengembangan dari setiap sektor tersebut sehingga proses pengembangannya menjadi lebih terencana, efisien, dan efektif.

Secara umum, dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika selama masa pembangunan 2014 sampai dengan 2018 tergolong baik yang ditunjukkan oleh tren IPM yang selalu positif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Namun demikian, nilai kesejahteraan ini rentan mengalami bias karena terdapat perbedaan pendapatan yang sangat ekstrim antara penduduk yang bekerja di lingkungan PT Freeport dan perusahaan afiliasinya dengan penduduk yang bekerja di institusi lainnya termasuk PNS.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Mimika yang mengesankan selama periode 2014 sampai dengan 2018 lebih menggambarkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat pendatang mengingat angka kemiskinan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 14,89% didominasi oleh penduduk pribumi.

SARAN

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, berdasarkan hasil pembahasan, peneliti memberikan sejumlah saran sebagai berikut: Pemerintah sebaiknya segera memikirkan sumberdaya-sumberdaya potensial alternatif yang dapat menjadi substitusi sektor pertambangan dan penggalian ke depan mengingat karakter sektor pertambangan dan penggalian yang sangat rentan terhadap gejolak faktor-faktor makro ekonomi maupun non ekonomi sebagai akibat dari sifatnya yang *unrenewable* dan langka. Sifat *unrenewable* ini juga mengakibatkan sumberdaya ini bejangka waktu umur ekonomis yang terbatas.

Pengembangan setiap sektor dalam struktur PDRB Kabupaten Mimika hendaknya memperhatikan karakter tingkat dan pola pertumbuhannya masing-masing. Penyusunan strategi pengembangan dari setiap sektor dapat menggunakan matriks pemetaan strategi pengembangan komponen PDRB Kabupaten Mimika berdasarkan tingkat dan pola pertumbuhannya. Penggunaan matriks ini akan berdampak pada pola perencanaan dan pembangunan setiap sektor yang lebih terencana, efisien, dan efektif sehingga diharapkan secara bertahap terjadi *sharing* dominasi dalam struktur PDRB Kabupaten Mimika.

Penghitungan IPM Kabupaten Mimika hendaknya dilakukan secara teliti dan spesifik membedakan penduduk yang bekerja pada PT Freeport beserta perusahaan

afiliasinya dengan penduduk yang bekerja di institusi lain dan PNS sehingga dapat diperoleh gambaran tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih tepat.

Pemerintah sebaiknya meningkatkan fokus dan konsistensi pada program-program pengembangan ekonomi masyarakat pribumi. Pembangunan pusat-pusat strategis pelayanan kesehatan dan pendidikan serta kegiatan ekonomi kerakyatan yang dihubungkan oleh sarana dan prasarana transportasi yang minim hambatan menjadi sangat strategis bagi penduduk pribumi untuk mengakses hasil-hasil pembangunan yang akan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Dalam hal ini termasuk program-program-program afirmasi khusus yang memberikan peluang kepada penduduk pribumi dapat dengan cepat memiliki kualitas keilmuan, keterampilan, dan ketekunan yang sama dengan masyarakat pendatang dalam mengambil tindakan-tindakan produktif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astri, Meylina. (2013). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia," *Jurnal Pendidikan ekonomi dan Bisnis* vol.1 no.1 (Maret 2013), hal. 77-102.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Mimika Dalam Angka 2018*, Mimika: BPS.
-(2015). *Produk Domestik Regional Bruto Mimika 2015*, Mimika: BPS.
- (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mimika 2018*, Mimika: BPS, Jhingan M.L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Melliana, Ayunanda. (2013). "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel", *Jurnal Sains dan Seni Pomits* vol.2 no.2 , hal 237-242.
- Saputra, Whisnu Adhi. (2011). "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah." *Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Suharyadi dan Purwanto, S.K. (2016). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sukirno, Sadono. (2009). Mikro Ekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2003). Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P dan Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.